

**DINAMIKA PARIWISATA MASAL DI NUSA CENINGAN,  
BALI: ANTARA NEGARA, ADAT DAN PASAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Strata Sosial Satu (S.Sos)

**Disusun Oleh:**

Lisa Aditia Putra

NIM 15720042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Aditia Putra  
NIM : 15720042  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Skripsi : Dinamika Pariwisata Massal di Nusa Ceningan, Bali:  
Antara Negara, Adat dan Pasar

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul “Dinamika Pariwisata Massal di Nusa Ceningan, Bali: Antara Negara, Adat dan Pasar” merupakan hasil dari karya pribadi bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali bagian tertentu yang penulis ambil untuk bahan acuan yang telah dibenarkan secara ilmiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Lisa Aditia Putra

NIM. 15720042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lisa Aditia Putra

NIM : 15720042

Program Studi : Sosiologi

Judul Skripsi : Dinamika Pariwisata Massal di Nusa Ceningan, Bali:  
Antara Negara, Adat dan Pasar

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang sosial.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah. Demikian perhatiannya, dicapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 April 2021



Ambar Sari Dewi, Ph.D

NIP. 197612102008012008



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-313/Un.02/DSH/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PARIWISATA MASAL DI NUSA CENINGAN, BALI: ANTARA NEGARA, ADAT DAN PASAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LISA ADITIA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15720042  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 607fc5cf48048



Penguji I

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 608230601833e



Penguji II

B.J. Sujibto, S.Sos., M.A.

SIGNED

Valid ID: 608112874a46a



Yogyakarta, 26 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60827a469dcf9

**MOTTO**

*Janga segan untuk memulai sesuatu dari yang terkecil*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri penulis pribadi,  
terima kasih sudah berjuang melalui banyak hal dan untuk  
orang tua penulis (alm. Bapak Nur Salam,  
almh. Ibu Mujiati dan Ibu Siti Fatonah)*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Pariwisata Massal di Nusa Ceningan, Bali: Antara Negara, Adat dan Pasar”

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak terlepas pada kekurangan, baik dari isi maupun dari segi kepenulisan, karena keterbatasan dari kemampuan pengetahuan dari penulis sendiri. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, dukungan dan masukan kepada penulis. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga atas segala wejangan dan nasihatnya kepada penulis.
2. Ibu Ambar Sari Dewi, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang telah memberikan masukan dan motivasi dengan sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Achmad Uzair, Ph.D selaku Dosen Pembimbing pertama, yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal, khususnya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera lulus.
5. Ibu Dr. Muryanti, MA selaku Kepala Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Prodi Sosiologi yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya untuk memperoleh gelar S1.
7. Mangku Mirah, Ibu Mirah dan Mbak Diah , yang telah membantu penulis selama proses penelitian ini berlangsung.
8. Yayasan Wisnu, Denpasar, Bali, khususnya Pak Suar dan Mbak Atik yang telah membantu penulis dalam proses penelitian, dan memperkenalkan penulis dengan masyarakat Nusa Ceningan.
9. Kepala Desa Lembongan dan Kepala Desa Adat Lembongan dan seluruh informan dan narasumber yang penulis temui, yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Orang tuaku, Alm. Bapak Nur Salam, terimakasih atas semuanya atas segala kesempatan yang telah diberikan, Almh. Ibu Mujiati, terima kasih telah melahirkanku di dunia ini dan mencecap pahit manisnya kehidupan, dan Ibu Siti Fatonah, terima kasih telah merawatku selama ini layaknya anak sendiri. Kepada kedua kakakku Mbak Eng dan Mbak Ik, terima kasih telah mengajarkanku banyak hal.
11. Bapak Alm. Ahmad Rodli dan Ibu yang telah banyak membantu penulis pada masa awal studi di UIN Sunan Kalijaga.
12. Teman-teman seperjuangan, seperkopian, Arif, Candra, Fahmi, Topik, Rosyid. Teman-teman kontrakan Anak Sholeh dan teman-teman seperjuangan di Sosiologi 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman di Yayasan Arkom Indonesia, khususnya Mas Aldi dan Mb Nisa yang telah banyak membantu penulis.
14. dan, terakhir, kepada Tri Muryani, yang telah menemani penulis berjuang mencapai banyak hal dan tidak henti-hentinya memberikan *support* serta semangat kepada penulis.

## ABSTRAK

Nusa Ceningan merupakan salah satu destinasi pariwisata internasional di Bali yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai destinasi pariwisata internasional, perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, serta konstelasi pasar pariwisata di tingkat nasional maupun internasional. Dan di tingkat lokal, perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan juga tidak dapat dilepaskan dari peranan adat. Hal ini menempatkan Nusa Ceningan sebagai lokus perebutan sumber daya. Yang dalam perkembangannya membawa banyak konsekuensi. Bukan hanya konsekuensi dalam hal sektor ekonomi, tetapi juga politik, sosial dan lingkungan. Dalam konteks perkembangan pariwisata konsekuensi-konsekuensi tersebut terrepresentasi dalam bentuk pariwisata massal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam bagaimana dinamika perkembangan pariwisata massal di Nusa Ceningan, dengan melihat bagaimana relasi antara negara, adat dan pasar.

Peneliti menggunakan pendekatan ekonomi-politik. Pendekatan ini digunakan utamanya agar dimensi sosial, politik dan ekonomi dapat terakomodir. Pendekatan ini kemudian diturunkan dalam beberapa konsepsi, 1) Konsepsi negara, 2) Konsepsi adat, 3) Konsepsi pasar. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua minggu pada pertengahan Maret 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah *instrumental case study*, dengan tiga Teknik pengambilan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yang terbagi menjadi tiga tahap 1) *Data condensation and reduction*, 2) *Data Display*, 3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa informasi penting mengenai perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan. Yakni *pertama*, dalam sejarah perkembangannya adat dan negara mengambil peran dominan, berbanding terbalik dengan peranan adat. *Kedua*, adanya perubahan sosial-ekonomi akibat dari industrialisasi dan kapitalisasi pariwisata di Nusa Ceningan, yang ditandai dengan hilangnya rumput laut sebagai basis ekonomi masyarakat, dan *land acquisition*. *Ketiga*, proses-proses ini didukung utamanya oleh iklim investasi dan pembangunan pariwisata yang masif yang dilegitimasi oleh regulasi dan kebijakan negara.

Berdasarkan data-data yang ditemukan, penelitian ini berhasil menemukan konfigurasi hubungan antara adat, negara dan pasar yang secara kronologis dapat direkonstruksi kedalam tiga periode. 1) Konfrontatif, 2) Kontestatif, 3) Eksploitatif. Relasi ini menunjukkan adanya bentuk subordinasi negara terhadap masyarakat. Yang kemudian menciptakan struktur kesempatan bagi terbentuknya pariwisata massal di Nusa Ceningan. Di mana pola relasi ini terus dipertahankan dan direproduksi berulang-ulang guna mempertahankan kepentingan negara dan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata massal merupakan jenis pariwisata yang dikehendaki oleh negara dan pasar.

**Kata Kunci: Ekonomi Politik, Pariwisata Massal, Nusa Ceningan**

## DAFTAR ISI

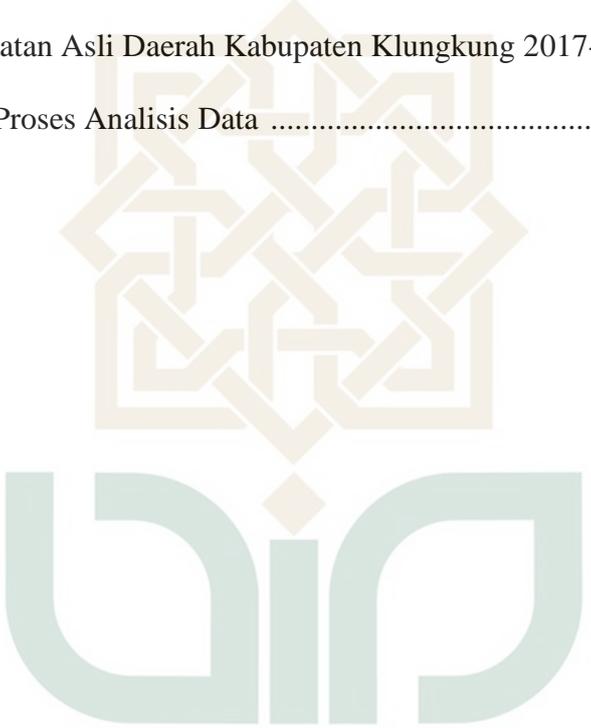
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR TABEL DAN BAGAB .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
1. Mendefinisikan Parwisata Massal .....	16
2. Konsep Ekonomi Politik dalam Pariwisata.....	18
3. Relasi Adat, Negara dan Pasar dalam Pariwisata Massal .....	27
G. Metode Penelitian .....	29

1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi dan waktu Penelitian .....	29
3. Sumber Data.....	30
4. Metode Pengumpulan Data .....	31
5. Metode Analisis Data .....	36
H. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM PARIWISATA NUSA CENINGAN, BALI.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Nusa Ceningan .....	41
1. Sejarah Nusa Ceningan .....	41
2. Geografis dan Tata Ruang.....	43
3. Administrasi dan Kependudukan .....	46
4. Sosial Budaya.....	48
5. Ekonomi .....	51
6. Politik dan Pemerintahan .....	52
B. Gambaran Umum Pariwisata Nusa Ceningan.....	53
C. Perkembangan dan Pertumbuhan Pariwisata Nusa Ceningan.....	55
1. Sejarah Pariwisata di Nusa Ceningan.....	55
2. Gambaran Pengelolaan dan Tingkat Kunjungan Wisatawan .....	62
<b>BAB III:</b>	
<b>NUSA CENINGAN DALAM PUSARAN INDUSTRI PARIWISATA .....</b>	<b>67</b>
A. Peranan Negara, Adat dan Pasar dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Pariwisata di Nusa Ceningan.....	68
1. Peranan Negara .....	69

2. Peranan Adat .....	72
3. Peranan Pasar .....	74
B. Gerakan Jaringan Ekowisata Desa .....	76
C. Potret Kapitalisasi dan Industrialisasi Pariwisata Nusa Ceningan .....	78
1. Hilangnya Rumput Laut dari Nusa Ceningan .....	78
2. Investasi dan Kebijakan dalam Pembangunan Pariwisata di Nusa Ceningan.....	82
3. <i>Land Acquisition</i> .....	88
BAB IV:	
HUBUNGAN ADAT, NEGARA DAN PASAR DALAM DINAMIKA	
PERKEMBANGAN PARIWISATA MASAL DI NUSA CENINGAN.....	93
A. Potret Hubungan Adat, Negara dan Pasar dalam Pariwisata Nusa Ceningan Dari Masa ke Masa .....	94
1. Konfrontatif.....	94
2. Kontestatif .....	98
3. Eksploitatif .....	102
B. Terbentuknya Pariwisata Masal di Nusa Ceningan.....	106
BAB V: PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	116

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel.1 Rekapitulasi Informan Wawancara .....	30
Tabel.2 Klasifikasi Penduduk Nusa Ceningan Berdasarkan Usia .....	43
Tabel.3 Destinasi Pariwisata di Nusa Ceningan .....	50
Tabel.4 Persentase Penerimaan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung 2017-2019.....	81
Bagan 1: Alur Proses Analisis Data .....	35



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Peta Persebaran Permukiman di Nusa Ceningan .....	32
Gambar.2 Peta Kepemilikan Tanah Adat/Pelabe Pura .....	47
Gambar.3 Peta Pembangunan Mega Proyek Green Island BTDC .....	56
Gambar.4 Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir .....	59
Gambar.5 Potret Wisatawan Menuju Nusa Lembongan .....	64
Gambar.6 Petani Rumput laut di Nusa Lembongan Juni 2015 (kiri) dan Mei 2016 (Kanan) 89 .....	78
Gambar.7 Ilustrasi Pelabuhan Segitiga Emas di Kabupaten Klungkung .....	84
Gambar.8 Plang Tanah Dijual di Nusa Ceningan .....	85
Gambar.9 Foto Udara Blue Lagon Avia Villa .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, industri pariwisata merupakan industri dengan pertumbuhan paling cepat di Dunia. Di negara-negara berkembang, pariwisata menjelma sebagai sektor utama penyumbang devisa negara<sup>1</sup>. Berdasarkan data *World Tourism Organization* (UNWTO) dalam *Tourism Highlights* tahun 2017, pergerakan turis di dunia mengalami peningkatan sebesar 7% atau 1,326 juta kunjungan dalam satu tahun. Selisihnya mencapai 86 juta kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan peningkatan terbesar setelah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009. Total pendapatan yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut adalah sebesar US \$ 1,340 milyar<sup>2</sup>.

Masih berdasarkan data yang sama, 9% dari total kunjungan turis dunia berada Asia Tenggara (mengalami peningkatan sebesar 8% dari tahun sebelumnya), dengan jumlah kunjungan sebesar 124,362 juta kunjungan dalam satu tahun. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-4 kunjungan terbesar di Asia Tenggara setelah Thailand, Malaysia dan Singapura. Dengan total kunjungan sebanyak 12,948 juta<sup>3</sup>.

Arif Yahya, Menteri Pariwisata Indonesia (2014-2019) dalam sambutannya di acara jumpa pers akhir tahun 2018 menyampaikan capaian sementara

---

<sup>1</sup> Takrima Sayeda, 'The Effects of Mass Tourism: An Evaluative Study on Cox's Bazar, Bangladesh', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22, No.1.5 (2017).

<sup>2</sup> World Tourism Organization (UNWTO), *UNWTO Tourism Highlights*, 2018th edn (Madrid, 2018). Hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.5

kunjungan wisman periode bulan Januari-Oktober 2018 secara kumulatif adalah sebesar 13,240 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 11,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan proyeksi perolehan devisa sebesar US \$ 17,6 milyar, sektor pariwisata menjadi sumber utama devisa negara yang setara atau bahkan mengalahkan CPO (*Crude Palm Oil/minyak kelapa sawit*) yang saat ini masih menempati posisi teratas sumber devisa negara<sup>4</sup>. Tentu hal ini bukan angan-angan tanpa dasar, mengingat sebelumnya pemerintah telah menargetkan 20 juta kunjungan wisman pada tahun 2019.<sup>5</sup> Jika ini berhasil, maka pendapatan sektor pariwisata akan meningkat signifikan.

Proyek besar pemerintah dalam industri pariwisata di Indonesia layak pisau yang memiliki dua sisi yang sama tajamnya. Di satu sisi, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan berimplikasi positif terhadap pemasukan devisa negara dan ekonomi masyarakat lokal. Tetapi di sisi lain, perkembangan pariwisata, terlebih yang berorientasi pada kuantitas (kuantitas produksi, konsumsi dan destinasi)<sup>6</sup> menciptakan tantangan baru bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dalam hal ini beberapa persoalan yang muncul diantaranya adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam; seperti tanah (yang dipergunakan untuk membangun ruang-ruang pariwisata (homestay, pembukaan tempat wisata baru), air, (untuk mengisi kolam renang, keperluan air

---

<sup>4</sup> Dea Apriliani, 'Kemajuan Pariwisata Indonesia, Penyumbang Devisa Terbesar Indonesia', *Good News from Indonesia*, 2018 <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/23/kemajuan-pariwisata-indonesia-penyumbang-devisa-terbesar-indonesia>>.

<sup>5</sup> Subagyo, 'Menpar Siap Raih Target 20 Juta Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui ATF', *Antara News*, 2019 <<https://www.antaraneews.com/berita/788826/menpar-siap-raih-target-20-juta-kunjungan-wisatawan-mancanegara-melalui-atf>>.

<sup>6</sup> Vilhelmiina Vainikka, 'Rethinking Mass Tourism', *Tourist Studies*, 13(3) (2013). hlm.271

hotel/homestay, wahana permainan, dan sebagainya), meningkatnya emisi baik dari transportasi maupun kebutuhan sehari-hari (memasak, pendingin/pemanas ruangan) dan hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>7</sup>

Tidak hanya muncul tindakan eksploitatif sebagai akibat melembaganya iklim pasar dalam model pariwisata massal, persoalan mengenai kerusakan lingkungan juga muncul dari sampah/limbah pariwisata. Sampah masih menjadi salah satu persoalan pariwisata yang paling sering disoroti. Dalam kacamata pemerintah, selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, persoalan sampah juga dianggap mengancam keberlangsungan pariwisata di Indonesia.<sup>8,9,10</sup> Sekalipun demikian, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan khusus mengenai pengelolaan sampah pariwisata. Sejauh ini, kebijakan yang dikeluarkan hanya menyoal harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar melalui Surat Edaran KLHK No. S.1230/PSLB3-PS/2016.<sup>11</sup>

Selain mengakibatkan permasalahan lingkungan, ekspansi industri pariwisata juga sering menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Sebagaimana yang sering terjadi dalam hal penguasaan tanah, sebagai salah satu

---

<sup>7</sup> United Nations Environment Programme and World Tourism Organization, *Tourism in the Green Economy- Background Report* (Madrid), hlm.4.

<sup>8</sup> Erika Kurnia, 'Kisah "Cendol" Dan Sampah Pariwisata Indonesia', *Kompas*, 2019 <<https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/09/11/kisah-cendol-dan-sampah-pariwisata-indonesia-untuk-mas-hen/>>;

<sup>9</sup> Dewi Purningsih, 'Masalah Sampah (Masih) Jadi Hambatan Pariwisata', *Greeners.Co*, 2019 <<https://www.greeners.co/berita/masalah-sampah-masih-jadi-hambatan-pariwisata/>>;

<sup>10</sup> Silvia Galikano, 'Sampah Masih Jadi Pekerjaan Besar Untuk Pariwisata', *CNN Indonesia*, 2016 <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160521180342-269-132441/sampah-masih-jadi-pekerjaan-besar-untuk-pariwisata>>.

<sup>11</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, *Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi* (Indonesia, 2018). Hlm. 13-15.

basis produksi industri pariwisata. Kasus reklamasi Teluk Benoa Bali<sup>12</sup> dan ancaman pengusuran masyarakat adat di Desa Gorontalo<sup>13</sup>, menjadi cukup menjadi bukti bagaimana industri pariwisata yang terbangun akibat iklim pasar juga menciptakan ketimpangan. Alih-alih menciptakan kesejahteraan, industri pariwisata malah lebih sering menciptakan kesenjangan dan kerusakan.

Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan dalam perkembangan industri pariwisata adalah masuknya korporasi-korporasi dan modal-modal besar dalam industri pariwisata yang mengeksploitasi dan menguasai sumberdaya, Kondisi ini tentu saja menjadi momok tersendiri bagi masyarakat lokal. Masuknya korporasi dan modal besar di beberapa daerah pariwisata Indonesia telah mengalienasi masyarakat daridatarnya. Sekaligus menciptakan kelas-kelas sosial baru, yakni para pekerja sektor pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai buruh di daerahnya sendiri.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, yakni pada era Soeharto melalui disahkannya UU No.1 Tahun 1967 dan tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri asing.<sup>14</sup> Konstelasi ekonomi-politik di Indonesia memang menciptakan dan memberi peluang besar atau dalam bahasa

---

<sup>12</sup> Tahun 2012 Gubernur Bali menerbitkan izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan Mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai kepada PT. Tirta Rahmat Bahari (PT. TRB) seluas 102.22 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Bali No. 1051/03-L/HK/2012 selama 75 tahun. Padahal kawasan ini merupakan kawasan Mangrove, yang memiliki fungsi penting untuk menangkal abrasi dan intrusi air laut, sekaligus menjadi rumah bagi beragam jenis flora dan fauna laut. Keputusan ini menuai tantangan dari berbagai elemen masyarakat (Sumber: tanahkita.id).

<sup>13</sup> Konflik ini terjadi akibat Kebijakan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Flores, yang akan menjadikan lahan yang ditinggali oleh masyarakat adat Desa Gorontalo sebagai kawasan wisata. Mereka dianggap tidak memiliki hak/ilegal untuk tinggal di kawasan tersebut. Karena areal tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi (Sumber: tanahkita.id).

<sup>14</sup> Putu Tuni Cakabawa Landra, 'Hukum Investasi Dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali', *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol.7, (2018), hlm. 102.

lain mendukung terhadap masuknya korporat dan modal asing dalam industri pariwisata. Sebagai contoh, di Bali misalnya, pada tahun 2012 media nasional gencar membahas mengenai penguasaan modal asing dalam Industri pariwisata Bali. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 80% dari total jumlah investasi yang masuk dalam industri pariwisata Bali dikuasai oleh modal dari luar negeri.<sup>1516</sup> Praktik ini juga terekam melalui penguasaan investor asing terhadap tanah/lahan di daerah pariwisata.

Salah satu bukti konkrit dimana negara memang mendukung masuknya modal asing di Indonesia (tidak hanya terbatas pada industri pariwisata) adalah disahkannya RUU Penanaman Modal (RUU PM) pada 29 Maret 2007, sebagai pembaharuan dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pengesahan UU PM ini oleh banyak pihak ditengarai sebagai penegasan ‘madzhab’ yang dipilih oleh pemerintah dalam konteks investasi asing dan pasar bebas. Dimana UU PM tersebut senada dengan salah satu prinsip *World Trade Organization (WTO)* – organisasi yang dianggap beraliran neoliberal – yang dikenal sebagai perjanjian *Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*. Investasi asing dalam konteks ini dianggap sebagai jalan pintas untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Made ed. Asdhiana, ‘80 Persen Investasi Pariwisata Bali Dikuasai Asin’, *Kompas*, 2012 <<https://travel.kompas.com/read/2012/11/25/08404619/80.persen.investasi.pariwisata.bali.dikuasai.asing>> [accessed 25 July 2020].

<sup>16</sup> Aditya Pradana Putra, ‘Duh, 80 Persen Investasi Pariwisata Bali Dikuasai Asing’, *Republika Online*, 2012 <<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/11/24/mdzsbu-duh-80-persen-investasi-pariwisata-bali-dikuasai-asing>> [accessed 25 July 2020].

<sup>17</sup> Martin Manurung, ‘Investasi Asing, Antara Mitos Dan Realita’, *Indo Progress*, 2007 <<https://indoprogress.com/2007/04/investasi-asing-antara-mitos-dan-realita/>> [accessed 25 July 2020].

Terbuka lebarnya pasar bebas sebagai arena pertarungan kepentingan, telah menempatkan negara (baca: pemerintah Indonesia) dalam posisi yang kurang menguntungkan, untuk tidak mengatakan lemah. Berbeda dengan negara-negara maju yang berhasil melakukan konsolidasi kekuatan negara dengan korporasi, di negara berkembang pertemuan antara negara dan pasar telah melahirkan satu bentuk relasi yang timpang, dimana pasar membentuk negara.<sup>18</sup>

Dalam posisi demikian, implikasinya bukan hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, berupa ketergantungan negara secara terus-menerus terhadap ekonomi internasional. Akan tetapi juga pada praktik-praktik politik domestik, khususnya praktik-praktik demokratisasi di masyarakat.<sup>19</sup> Dengan runtuhnya orde baru, dan bergesernya pendulum sistem kekuasaan dari sentralistik menuju desentralistik, seharusnya kondisi ini mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Dalam konteks perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya Bali akses desentralisasi sebagai akibat dari berlakunya sistem pasar bebas mewujudkan dalam bentuk dikuasanya sumberdaya alam oleh korporasi sebagaimana yang sudah disebutkan di awal. Dalam hal lain permasalahan lebih serius terjadi pada adanya tekanan pasar bebas terhadap regulasi pariwisata yang dikeluarkan oleh negara, yang mendorong terjadinya privatisasi sumberdaya pariwisata oleh swasta.

Praktek-praktek semacam itu sudah sering mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal. Salah satunya adalah perlawanan dari masyarakat Ceningan

---

<sup>18</sup> Ade Marup Wirasenjaya, 'Disharmoni Negara Dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal', *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.2, (2013), hlm. 84.

<sup>19</sup> Wirasenjaya, *Ibid*, hlm. 89-90.

terhadap rencana pembangunan *Green Island* pulau tersebut oleh pemerintah Kabupaten Klungkung, bekerja sama dengan PT. Bali *Tourism Development Corp (BTDC)*. Hal ini dikarenakan, tumpang tindih antara politik dan ekonomi pariwisata, telah berdampak signifikan terhadap marjinalisasi adat dan kedaulatan mereka. Marjinalisasi ini terjadi misalnya dalam bentuk perampasan-perampasan terhadap tanah adat oleh berlakunya hukum negara.<sup>20</sup> Dimana dalam tatanan hukum adat, seringkali tanah adat merupakan basis produksi, sebagaimana tanah *laba pura* dalam adat Bali.<sup>21</sup> Perampasan terhadap tanah adat ini tentu melemahkan adat itu sendiri, dan secara lebih jauh menciptakan ketergantungan terhadap struktur lain.

Dinamika pariwisata yang melibatkan antara negara, adat dan pasar inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini secara kritis akan mengkaji lebih detail mengenai relasi antara negara, adat dan pasar dalam konteks perkembangan pariwisata di Ceningan dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah, bagaimana dinamika perkembangan pariwisata asal di Nusa Ceningan, Bali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> M. Syamsudin, 'Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara', *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.15, No.3 (2008), hlm. 341.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Mangku Mirah pada 11 Maret 2019.

1. Menjelaskan dinamika perkembangan pariwisata massal di Nusa Ceningan. Secara spesifik tujuan ini akan menjelaskan:
  - a. Menjelaskan sejarah perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan.
  - b. Menjelaskan mengenai konteks sosial, politik dan budaya dalam perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan.
  - c. Menjelaskan perubahan sosial yang terjadi dalam konteks perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan.
2. Menjelaskan peran adat, negara dan pasar dan relasinya dalam membentuk pariwisata massal di Nusa Ceningan. Secara spesifik tujuan ini akan menjelaskan:
  - a. Menjelaskan peran adat, negara dan pasar serta pengaruhnya terhadap perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan.
  - b. Menjelaskan hubungan adat, negara dan pasar secara historis dari awal perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan beserta kecenderungan perubahannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian pariwisata dalam keilmuan sosiologi ekonomi dan sosiologi politik. Dalam hal ini, pariwisata tidak melulu merupakan sebuah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Namun, pariwisata juga memiliki dimensi sosial-politik yang dapat dikaji dan dikehati menggunakan perspektif keilmuan sosiologi.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diperuntukkan bagi masyarakat lokal, pemerintah, pelaku ekonomi, dan organisasi swadaya masyarakat.

1. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan pariwisata yang lebih partisipatif.
2. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini bisa memberikan gambaran sederhana mengenai posisi mereka dalam perkembangan pariwisata di Ceningan.
3. Bagi pelaku ekonomi (korporasi), penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.
4. Terakhir bagi penggerak/organisasi swadaya masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk merancang strategi-strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan keswadayaan dalam mengelola sektor pariwisata.

## **E. Kajian Pustaka**

Secara umum permasalahan pariwisata yang dibangun dalam penelitian ini mencakup beberapa topik bahasan, yakni; dinamika dan ekonomi-politik pariwisata. Peneliti mengkategorikan beberapa kajian pustaka dalam rangka menunjang penelitian dan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan klasifikasi kajian dan penelusuran terhadap literatur-literatur terdahulu antara lain ialah dinamika, dampak, relasi budaya dari adanya pariwisata massal terhadap desa adat dan terakhir ialah relasi entitas ekonomi-politik dari pariwisata massal terhadap desa adat.

Kategori pertama ialah penelitian mengenai dinamika perkembangan pariwisata. Beberapa penelitian dilakukan oleh I Putu Gatot Adiprana dan IGA Oka Mahagangga,<sup>22</sup> yang berjudul *Dinamika Perkembangan Pariwisata di Desa Pakraman Ubud*. Penelitian lain soal dampak dari pariwisata juga dilakukan oleh Chong Ka Leong<sup>23</sup> yang berjudul *The “Noble” Impacts of Mass Tourism on Bali Island: A Local Prospective*. Kedua penelitian ini mengkaji dinamika perkembangan pariwisata di Bali, baik dampak sosial, ekonomi, maupun budaya. Mereka mencoba mengkaji lebih dalam perubahan-perubahan sosial-budaya apa saja yang terjadi dalam konteks perkembangan pariwisata.<sup>24</sup> Hasil penelitiannya meunjukkan bahwa setidaknya perkembangan industri pariwisata telah mengakibatkan perubahan sosial dan budaya diantaranya adalah perubahan matapencaharian, dari agraris ke industri pariwisata, perubahan gaya hidup, dari tradisional ke modern dan perubahan kesenian, dimana kesenian sebelumnya merupakan ekspresi spiritualitas-keagamaan menjadi ekspresi eksistensial bernuansa komersil.<sup>25</sup> Meskipun dititik ini Ka Leong menganggap bahwa dampak di atas juga bernilai positif terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat.

Penelitian berikutnya yakni membahas mengenai dampak dari pariwisata masal. Beberapa penelitian mengenai topik ini antara lain ialah *pertama*,

---

<sup>22</sup> I Putu Gatot Adiprana and IGA Oka Mahagangga, ‘Dinamika Perkembangan Pariwisata Di Desa Pakraman Ubud’, *Jurnal Destinasi Pariwisata Universitas Udayana*, Vol. 1, No (2013).

<sup>23</sup> Chong Ka Leong, ‘The “Noble” Impacts of Mass Tourism on Bali Island: A Local Prospective’, *Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts*, Vol. 11 (2019).

<sup>24</sup> Leong, *Ibid*, hlm. 35

<sup>25</sup> Leong, *Ibid*, hlm. 42

penelitian yang dilakukan oleh Wang Le dan Mujafar Syah<sup>26</sup> berjudul *Economic and Environmental Impacts of Mass Tourism on Regional Tourism Destinations in Indonesia*. Kedua, penelitian dilakukan oleh Cong Ka Leong<sup>27</sup> dengan judul *The Side Effects of Mass Tourism: The Voices of Bali Islanders*. Penelitian Lee dan Syah menekankan pada aspek pengaruh/*impact* pariwisata massal terhadap sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia khususnya di Bali.<sup>28</sup> Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan melakukan uji kointegrasi atau hubungan jangka panjang antar variabel.<sup>29</sup> Hasil penelitian ini jika disederhanakan adalah, peningkatan ekonomi pariwisata berbanding terbalik dengan degradasi lingkungan/memburuknya kondisi lingkungan.

Penelitian dengan topik bahasan mengenai relasi desa adat dengan pariwisata massal. Beberapa penelitian dengan topik ini antara lain dilakukan oleh Ni Gusti Ayu Kartika<sup>30</sup>, berjudul *Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat dan Pariwisata*. Topik serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Putu Artini dan Iga Lies Anggreni<sup>31</sup> berjudul, *Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)*. Selanjutnya, penelitian. Selanjutnya,

---

<sup>26</sup> Jung Wan Lee and Ahmad Mujafar Syah, 'Economic and Environmental Impacts of Mass Tourism on Regional Tourism Destinations in Indonesia', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 5 No. 3 (2018).

<sup>27</sup> Chong Ka Leong, 'The Side Effects of Mass Tourism: The Voices of Bali Islanders', *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, Vol. 25 (2020).

<sup>28</sup> Leong, *Ibid*, hlm. 31-32

<sup>29</sup> Leong, *Ibid*, hlm. 35-37.

<sup>30</sup> Ni Gusti Ayu Kartika, 'Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat Dan Pariwisata', *Jurnal Ilmiah Pariwisata, Agama Dan Budaya Fakultas Dharma Duta*, Vol. 4, No (2019).

<sup>31</sup> Ni Wayan Putu Artini and Iga Lies Anggreni, 'Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)', *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana*, Vol. 1, No (2007).

penelitian yang dilakukan oleh Maria Bernadetha Ringa dan Nyoman Djinar Setiawina<sup>32</sup> dengan judul *Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*. Keempat penelitian diatas secara spesifik mengkaji hubungan timbal balik antara pariwisata dan desa adat atau masyarakat lokal menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengelaborasi peran serta fungsi desa adat secara historis maupun praktis.<sup>33</sup> Ni Gusti Ayu Kartika menyebutkan bahwa eksistensi desa adat dalam kegiatan ekonomi-pariwisata membawa dampak positif, begitupun juga sebaliknya. Desa adat berperan sebagai kontrol terhadap perkembangan pariwisata<sup>34</sup>, sedang pariwisata berperan dalam menjadikan tradisi/budaya bernilai ekonomis dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup> Sedangkan Artini dan Anggreni, dalam penelitiannya menjelaskan relasi antara desa adat dan pariwisata dari sisi peran dan fungsinya. Desa Adat Seminyak membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai BAPEDES (Badan Pembangunan Desa). Lembaga ini berfungsi untuk mengatur dan mengelola daerah pariwisata (pantai) dari segi keamanan, kebersihan dan pedagang informal.<sup>36</sup> Hasil penelitian Maria Bernadetha Ringa dan Nyoman Djinar Setiawina juga menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah

---

<sup>32</sup> Maria Bernadetha Ringa and others, 'Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Bapeda NTT*, Vol. 5 (2017).

<sup>33</sup> Ringa dkk, *Ibid*, hlm. 2-8

<sup>34</sup> Ringa dkk, *Ibid*, hlm. 1

<sup>35</sup> Ringa dkk., *Ibid*, hlm. 14

<sup>36</sup> Ringa dkk., *Ibid*, hlm. 9-10

dalam industri pariwisata berdampak pada partisipasi masyarakat dibanding dengan peran dari swasta.

Terakhir, topik penelitian mengenai relasi entitas ekonomi-politik dari pariwisata masal terhadap desa adat. Hubungan pariwisata dengan entitas politik bisa dilihat dalam beberapa penelitian berikut ini. Skripsi yang ditulis oleh Aldwin Flobert Prayoga<sup>37</sup> berjudul *Politik Pariwisata: Relasi Pemerintah Daerah dan Balai Besar TNBTS dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo*. Penelitian lain dengan topik sama dilakukan oleh Piers Andreas Noak dan I Ketut Putra Erawan<sup>38</sup> berjudul *Multikulturalisme Desa di Bali Dalam Kontrol Negara: Implementasi Dana Desa Bagi Kegiatan Lintas Budaya di Badung dan Buleleng*. Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh Nowzellita Makahinda dan Daicy Lengkong<sup>39</sup> dengan judul *Peran Dinas Pariwisata dalam Pembangunan Industri Pariwisata Kota Bitung*. Ketiga penelitian ini secara garis besar membahas mengenai peran-peran dari lembaga negara dan masyarakat adat yang berdampak pada ekonomi-politik adanya pembangunan pariwisata massal. Prayoga mengkaji hubungan antara Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger) dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur, menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan mengelaborasi pola hubungan desentralistik yang terbentuk antar keduanya. Sedangkan I Ketut Putra

---

<sup>37</sup> Aldwin Flobert Prayoga, 'Politik Pariwisata: Relasi Pemerintah Daerah Dan Balai Besar TNBTS Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Bromo' (Universitas Airlangga, 2019).

<sup>38</sup> Piers Andreas Noak and I Ketut Putra Erawan, 'Multikulturalisme Desa Di Bali Dalam Kontrol Negara: Implementasi Dana Desa Bagi Kegiatan Lintas Budaya Di Badung Dan Buleleng', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, Vol. 1, No (2019).

<sup>39</sup> Nowzellita Makahinda, Daicy Lengkong, and Deysi Tampongongoy, 'PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BITUNG', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3 (2015).

Erawan menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis pada studi kasus. Mereka mengkaji secara kritis pola hubungan yang terbentuk antara negara dengan pemerintahan desa dalam kaitannya dengan implementasi dana desa untuk kepentingan pengembangan kegiatan lintas budaya di Badung dan Buleleng.<sup>40</sup> Penelitian Prayoga secara umum menunjukkan adanya ekses dalam pola relasi desentralistik dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Bromo. Ekses ini pada akhirnya menunjukkan adanya ketimpangan relasi, antara pemda sebagai pemangku kebijakan, dengan Balai Bear TNBTS sebagai pengelola kawasan pariwisata. Ketiga penelitian tersebut menjadi preseden dari bentuk relasi destruktif antar struktur dalam konteks perkembangan pariwisata.

Penelitian serupa dengan kajian politik diplomasi juga dilakukan oleh Christian Erens Ponglabba Andalagi<sup>41</sup>, yang berjudul *Tourism Diplomacy Between Indonesia and People's Republic of China (PRC): The Implementation of Marine in North Sulawesi as a Case Study*. Selain itu, penelitian serupa juga ditulis oleh Craig Webster dan Stanislav H Ivanov dengan judul *Political Economy and Tourism Policy: National Tourism Organisation and State Policy*.<sup>42</sup> Penelitian Andalagi menunjukkan bahwa, perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di Sulawesi Utara, semata-mata tidak hanya karena daya tarik destinasi wisatanya saja. Andalagi menyebutkan sisi penting dari

---

<sup>40</sup> Makahinda dkk., *Ibid*, hlm. 134-139

<sup>41</sup> Christian Erens Ponglabba Andalagi, 'Tourism Diplomacy Between Indonesia and People's Republic of China (PRC): The Implementation of Marine in North Sulawesi as a Case Study' (President University, 2018).

<sup>42</sup> Craig Webster, Stanislav Ivanov, and Steve Illum, 'Political Economy and Tourism Policy: NTOs and State Polic', *SSRN Electronic Journal*, 2009 <<http://ssrn.com/abstract=1372037>>.

hubungan diplomasi yang baik antar negara juga berperan besar.<sup>43</sup> Andalagi menyebutkan strategi itu berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan china di Indonesia secara signifikan.<sup>44</sup> Sementara dalam penelitian Craig Webster dan Stanislav H Ivanov menunjukkan bahwa ekonomi politik sangat mempengaruhi reaksi negara dalam tantangan pariwisata.

Literatur-literatur yang diampaikan di atas menunjukkan kompleksitas dunia pariwisata dalam konteks keilmuan sosial. Pariwisata tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi yang minim dimensi sosial-politiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Artini dan Anggreni menunjukkan hubungan pariwisata dengan entitas lokal (desa adat). Penelitian mereka mengambil posisi pariwisata dan adat sebagai entitas yang saling berhubungan dan bersifat mutual. Selain itu, penelitian mengenai peran negara yang dilakukan oleh Nowzellita, Daicy, Deysi dan Maria, Nyoman dan Made juga menyiratkan satu bentuk hubungan mutual dan fungsional antara keberadaan negara dengan ekosistem pariwisata di Nusa Tenggara dan Bintang.

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Prayoga, dan Noak dan Erawan menjelaskan sisi lain hubungan pariwisata dengan entitas lokal dan politik yang bersifat destruktif. Hal yang sama juga Digambarkan dengan jelas dalam dua penelitian yang dilakukan oleh Chong Ka Leong di Bali. Terakhir kompleksitas dunia pariwisata juga terlihat dari penelitian Andalagi, Lee dan Syah yang melihat dunia pariwisata dari sudut

---

<sup>43</sup> Webster dkk., *Ibid*, hlm. 3

<sup>44</sup> Webster dkk., *Ibid*, hlm. 68

ekonomi-politik yang melibatkan peran serta negara dan ekonomi di tingkat internasional. Kemudian penelitian Craig dan Ivanov yang menjelaskan mengenai bagaimana adanya keterkaitan antara keberadaan organisasi ekonomi di suatu negara dalam merespon tantangan pariwisata.

Dari kajian pustaka di atas, maka penelitian ini mengambil posisi berbeda. Jika penelitian di atas secara partikular membahas dimensi sosial, politik, ekonomi secara terpisah. Penelitian ini akan mencoba merekonstruksi dimensi sosial, politik dan ekonomi kedalam bentuk relasi antara negara, adat dan pasar. Dimana dalam studi literatur di atas, aktor-aktor ini merupakan aktor utama yang menggerakkan dunia pariwisata. Dengan meneliti hubungan tiga aktor ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang lebih dekat mengenai realitas dunia pariwisata. Penelitian ini secara umum akan melengkapi penelitian-penelitian di atas, sekalipun dalam beberapa hal penelitian ini menolak cara pandang hubungan antar aktor yang bersifat fungsional-mutual, sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian Kartik, Artini dan Daicy. Lebih dari itu, penelitian ini mencoba melihat secara kritis peran dan hubungan aktor yang terlibat dalam pariwisata di Nusa Ceningan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Mendefinisikan Pariwisata Massal**

*Tourism* atau pariwisata memiliki akar yang fundamental dalam kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk mengunjungi destinasi tertentu erat hubungannya dengan emosi, fantasi dan imajinasi. Dalam perspektif ini pariwisata tidak hanya menjadi sebuah proyek ekonomi (travel agent) semata,

tetapi memiliki akar psiko-sosiologis yang kuat. Pemenuhan atas kebutuhan tubuh untuk beristirahat dari kesibukan-kesibukan harian maupun dari tekanan-tekanan struktur sosial telah menempatkan *tourism*, khususnya di negara-negara maju sebagai kebutuhan vital. Pemenuhan atas kebutuhan *tourisme* yang tidak terkontrol dan pertemuan-pertemuannya dengan modal serta kepentingan ekonomi telah melahirkan apa yang disebut sebagai *mass tourism*.

Pembicaraan mengenai *mass tourism* tidak bisa dilepaskan dari definisi *mass tourism* itu sendiri. Sampai saat ini istilah *mass tourism* masih diperdebatkan maknanya. Kompleksitas bangunan epistemologis dari istilah *mass* menjadi faktor utama mengapa definisi dan pemaknaan terhadap *mass tourism* masih menjadi perdebatan. *Mass* dalam konteks *tourism* biasa dikaitkan konsumsi dan produksi massal, dalam hal destinasi, akomodasi, transportasi dan sebagainya. John Storey (2012) menyatakan *mass* berhubungan dengan kapitalisme dan budaya materialisme yang saat ini menguasai dunia, Vainikka (2013) menyatakan bahwa *mass* bukanlah sesuatu yang natural, tetapi merupakan konstruksi sosial yang melibatkan banyak struktur. Berdasarkan *framework* ini *mass tourism* adalah suatu tatanan yang dikonstruksi berdasarkan kepentingan tertentu yang melibatkan struktur-struktur sosial tertentu, baik dalam lingkup lokal maupun global.

Sebagai sebuah pilar yang menopang kepentingan, tentu dalam pelangganan *mass tourism* terdapat pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya ada dua struktur yang sering terlibat membangun jejaring kuasa dalam *mass tourism*, yakni pemerintah, yang merupakan

representasi dari Negara, dan pemodal, yang merupakan representasi dari pasar. Pemerintah sebagai representasi negara adalah pemegang kebijakan. Tentu sebagai pihak pemegang regulasi, akan sangat mudah membuka ruang-ruang masuknya modal-modal dalam kekuasaannya. Proses (re)produksi *mass tourism* ini terus dilakukan oleh aktor-aktor tersebut melalui struktur yang sudah dibangun untuk menciptakan ketergantungan. Dengan terciptanya ketergantungan terhadap satu struktur tertentu maka ketahanan struktur tersebut dapat dipastikan jauh lebih tangguh.<sup>45</sup>

## **2. Konsep Ekonomi Politik dalam Pariwisata**

Untuk menelisik lebih dalam bangunan relasi antara adat, negara dan pasar dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan pariwisata masal di Ceningan, penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi-politik.<sup>46</sup> Pendekatan ekonomi-politik menekankan bahwa antara negara dan pasar saling terkait dan berkelindan. Relasi ini juga berdampak terhadap entitas lain, termasuk adat dan masyarakat lokal. Lebih dari itu, pariwisata masal tumbuh dan berkembang bukan sebagai sebuah keniscayaan dalam ruang kosong. Pariwisata masal tumbuh dan berkembang dalam iklim ekonomi-politik, yang setidaknya melibatkan relasi antara negara, adat dan pasar.

Sebagai salah satu sumber devisa terbesar negara dan juga sebagai komoditas kolektif, tentu pemerintah tidak bisa serta-merta memberikan mekanisme

---

<sup>45</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>46</sup> Istilah “ekonomi-politik”, menurut Groenewegen 1987, pertama kali dipakai dan diperkenalkan di Perancis pada abad 17. Menurutnya orang yang pertama kali memakai istilah tersebut adalah Montchretien pada tahun 1615 dan John Stuart Mill (1761) yang pertama kali menggunakan istilah tersebut sebagai judul buku, yakni, *An Inquiry into the Principles of Political Economy*.

pariwisata, khususnya di Bali kepada pasar sepenuhnya. Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Priyono menyatakan, negara memiliki beberapa tugas utama. *Pertama*, melindungi warganya dan menegakkan pertahanan nasional. *Kedua*, melindungi warga dari segala tindak kekerasan, pemerasan dan pemaksaan serta menegakkan dan menyelenggarakan keadilan. *Ketiga*, mengadakan dan mempertahankan sarana prasarana publik dari kepentingan golongan tertentu.<sup>47</sup> Berdasarkan konsepsi tersebut, dapat dipahami bahwa negara berkepentingan dan berkewajiban mengelola sektor pariwisata sebagai ikhtiar untuk menegakkan dan menyelenggarakan keadilan dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam konteks kepariwisataan di Indonesia, kewajiban dan peran ini terwujud dalam kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya lewat institusi kepariwisataan seperti Kementerian Pariwisata.

Yang menarik dari pendekatan ekonomi politik adalah konsepsi mengenai kewajiban dan tanggung jawab tidak melulu dimaknai sebagai sesuatu yang normatif. Akan tetapi, secara kritis pendekatan ini mencoba memahami peran serta negara, pasar, dan adat dalam konteks kontestasi kepentingan dalam memperebutkan otoritas politik dan hukum sebagai instrumen untuk mengatur mekanisme pasar.<sup>48</sup> Mengenalisis hubungan ketiga struktur tersebut

---

<sup>47</sup> Priyono, B. H. (2002). Dalam Pusaran Neoliberalisme. In I. Wibowo (Ed.), *Neoliberalisme*. Yogyakarta, Pustaka Cindelas.

<sup>48</sup> Abdil Mughis Mudhofir, 'Negara, Kapital Dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson Dan Vedi R. Hadiz', dalam *Oligarki: Teori Dan Kritik*, ed. Abdil Mughis Mudhofir dan Coen Husein Pontoh (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020), hlm. 37.

menggunakan pendekatan ekonomi-politik dapat menjelaskan mengenai dinamika perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di Ceningan.

Dalam penelitian ini, secara lebih spesifik peneliti menggunakan pendekatan ekonomi-politik berbasis negara. Berdasarkan penjelasan dari Corporaso dan Levine, pendekatan ekonomi-politik berbasis negara ini mengedepankan ide bahwa negara memiliki peran aktif dalam bentuk agenda-agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Artinya, dalam hal ini negara bukan merupakan variable dependen yang tidak memiliki kekuatan selain dari perekonomian (determinasi ekonomi terhadap negara).<sup>49</sup>

Selanjutnya, ada beberapa proporsisi penting dalam pendekatan ekonomi-politik yang dikedepankan dalam penelitian ini. *Pertama*, melalui pendekatan ekonomi-politik penelitian ini berusaha memahami bagaimana logika-logika hubungan kekuasaan terbentuk, dengan mengacu pada bagaimana kontestasi sumberdaya ekonomi dan kekuasaan. *Kedua*, fenomena kelas ditengarai sebagai fenomena pertentangan kepentingan sumberdaya. *Ketiga*, sejarah perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di Ceningan dalam konteks ekonomi-politik tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat teleologis.<sup>50</sup> *Keempat*, identitas, kebudayaan dan kelas tidak dipahami sebagai secara esensial, tetapi merupakan

---

<sup>49</sup> James A. Corporaso and David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 446-447.

<sup>50</sup> Argumentasi sejarah bersifat teleologis bertumpu pada cara berfikir bahwa sejarah dan dunia ini digerakkan menuju satu bentuk tujuan tertentu. Para sejarawan memaknai ini dalam kerangka keterlibatan tuhan dalam mengatur jalannya kehidupan alam semesta. Dalam konteks ekonomi-politik, sejarah tidak dimaknai sedemikian adanya, tidak ada cetak biru mengenai sejarah yang bersifat universal yang mengatur jalannya kehidupan. Dalam hal ini, sejarah digerakkan oleh pertentangan sosial dan ekonomi.

wujud dari ekspresi hubungan-hubungan sosial yang kompleks. *Kelima*, hubungan antara agen dan struktur ditempatkan secara dialektis.<sup>51</sup>

Untuk mendukung kerangka teori dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan mengenai konsepsi negara, adat, dan pasar dalam perspektif ekonomi-politik.

### **1. Konsepsi Negara**

Dalam pendekatan ekonomi-politik, ada beberapa teori mengenai negara. Diantaranya adalah konsepsi teoritis mengenai negara yang dikemukakan oleh teoritis Marxian/Neo-Marxian. Sebagian besar tulisan mengenai isu ini didominasi oleh pembahasan mengenai perdebatan antara aliran instrumental, yang menempatkan negara sebagai alat kepentingan kelas dan aliran strukturalis yang menganggap negara memiliki otonomi. Perdebatan ini ditandai oleh perubahan-perubahan dalam karya Mark, khususnya mengenai perubahan yang signifikan antara Mark muda dan Mark tua.<sup>5253</sup>

Mark dalam karya-karya awalnya, belum secara spesifik mengedepankan teori negara berdasarkan konsep kelas dan kapitalis, dan masih terpengaruh dengan gaya berfikir Hegelian, dengan memfokuskan konsepsi teoritisnya mengenai negara pada faktor-faktor penentu perilaku negara, seperti sistem ekonomi dan kelas sosial. Oleh karenanya, menurut pandangan para strukturalis, salah satu tema pokok dalam teori Mark tentang negara adalah

---

<sup>51</sup>Mudhofir *Op.Cit.*, hlm. 36-41

<sup>52</sup> Eric Hiariej, 'Teori Negara Marxis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, Vol.7, No. (2003), hlm. 1;

<sup>53</sup> Anto Sangaji, 'Manifesto Komunis Dan Teori Negara', *Indo Progress*, 2011 <<https://indoprogress.com/2011/07/manifesto-komunis-dan-teori-negara/>> [accessed 23 July 2020].

pengaruh *economic base* terhadap keseluruhan *political superstructure*.<sup>54</sup> Namun, konsepsi ini tidak sepenuhnya bersifat reduksionis dan determinan terhadap ekonomi, dalam hal ini, Mark juga mengembangkan teori negara instrumental, yang menempatkan negara sebagai representasi kelas. Secara umum teori ini, menempatkan negara sebagai sesuatu yang dependen dan tidak memiliki kedaulatan politik. Namun menjadi alat bagi kepentingan kelas tertentu sebagai instrumen penindasan dan administrasi untuk mengontrol kekuasaan.<sup>55</sup>

Seiring dengan perkembangan Marxisme, muncul teori negara strukturalis semi otonom. Teori ini menjadi semacam penengah perdebatan antara antara strukturalis dan instrumental. Dalam pandangan teori ini, negara tidak serta merta menjadi instrumen dan dikontrol sepenuhnya oleh kelas tertentu. Namun negara memiliki independensi/otonomi relatif<sup>56</sup>, dimana dalam hal ini negara menjadi medan perjuangan bagi kelas tertindas, dengan berdasar pada mediasi *self-interest*.<sup>57</sup> Artinya dalam konsepsi negara strukturalis semi otonom ini, negara menjadi arena kontestasi kepentingan kelas, dimana satu kepentingan bisa dilawan dengan kepentingan lain. Dalam bahasa lain, otonomi di sini tidak diartikan bahwa negara memiliki kehendak yang sama

---

<sup>54</sup> Eric Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

<sup>55</sup> Eric Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

<sup>56</sup> Wasito Raharjo Jati, 'Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga', *Masyarakat Indonesia*, Vol. 39, N (2013), hlm. 137

<sup>57</sup> Martin Suryajaya, 'Dialectical Materialism Strikes Back', *Indoprogess*, 2012 <<https://indoprogess.com/2012/08/dialectical-materialism-strikes-back/>> [accessed 23 July 2020].

sekali tidak dapat dipengaruhi oleh individu-individu dan masyarakat dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kemauannya sendiri.<sup>58</sup>

## 2. Konsepsi Adat

Secara umum ‘adat’ dalam Bahasa Indonesia bisa bermakna ‘kebiasaan’ atau ‘tradisi’. Sepintas, istilah ini tidak mengandung satu bentuk determinasi politik maupun ekonomi sama sekali, bahkan istilah adat memiliki konotasi tertib, tenang dan penuh konsensus. Geertz sebagaimana dikutip oleh Warren menyatakan, lebih dari sekedar hukum atau praktik tradisional, adat juga harus dipahami dalam rangka menerapkan konsep-konsep moral dan perilaku kesopanan. Dalam hal ini ada visi religius yang mendasari hubungan manusia dengan realitas kosmik.<sup>59</sup>

Namun pasca berkuasa sampai runtuhnya orde baru, terminologi adat mengalami pergeseran dan perluasan makna. Penggunaan kata ‘adat’ diasosiasikan kepada satu bentuk aktivisme, gerakan perlawanan atau protes dan konflik, yang kemudian dilekatkan dengan frasa “kebangkitan adat”.<sup>60</sup> Terminologi ‘adat’, khususnya frasa ‘kebangkitan adat’ dalam konteks ini memiliki implikasi politis. Dalam konteks yang lebih luas, dimensi politis dari adat sudah terbangun dari berkembangnya identitas politik masyarakat adat, yang disebut sebagai *indigenism*.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Carporaso dan Levine, hlm. 474-475.

<sup>59</sup> Carol Warren, *Adat and Dinas Balinese Communities in the Indonesian State* (New York: Oxford University Press (OUP), 1993), hlm. 3.

<sup>60</sup> Davidson, Henley, and Sandra Moniaga (eds). *Adat Dalam Politik Indonesia*, ed. by (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 1.

<sup>61</sup> Davidson dkk., *Ibid*, hlm. 3

Yang ingin ditekankan dalam konsepsi mengenai adat di sini adalah, bahwa adat bukan hanya sekedar tata aturan dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Namun adat juga memiliki dimensi politis, sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan, ditengah masuknya negara dalam sistem tata kelola adat. Sebagaimana yang terjadi di Bali, dengan dibentuknya desa adat/desa pakraman. Dalam definisi lain yang sering dipergunakan dalam konteks politik, adat merupakan serangkaian rumit dan saling terkait antara hak dan kewajiban (*a complex of rights and obligations*) yang mengikat antara sejarah, tanah dan hukum.<sup>62</sup>

### 3. Konsepsi Pasar

Dalam perspektif ekonomi-politik, pasar didefinisikan sebagai arena pertukaran terjadi, dimana individu-individu pemilik properti bertemu untuk mencapai satu kepuasan tertentu.<sup>63</sup> Dalam konsepsi demikian, pasar bersifat kompetitif dan didominasi oleh kepentingan-kepentingan individu yang dikondisikan oleh kekuatan kompetisi. Dalam bahasa lain, pasar bisa diartikan sebagai mekanisme sosial untuk memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Akan tetapi, secara lebih spesifik, pasar yang dimaksudkan disini bukan sebagai pasar yang oleh Karl Polanyi dan Mark dianggap sebagai andalan kapitalis dan telah menyalahi konsep ekonomi sebagai kegiatan untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karenanya, pasar sebagai instrumen

---

<sup>62</sup> Davidson dkk., *Ibid*, hlm. 4

<sup>63</sup> Carporaso dan Levine, *Op.Cit.*, hlm. 222.

ekonomi, masuk dalam perilaku manusia yang terikat dan diatur dalam etika dan filsafat moral.<sup>64</sup>

Lebih spesifik lagi, Carporaso dan Levine membuat batasan-batasan tertentu dimana pasar dalam konteks ekonomi-politik, bukan semata-mata struktur utama dalam menunjang sistem ekonomi. Kondisi ini mengandaikan ada struktur-struktur atau lembaga-lembaga lain yang berperan dalam menentukan proses-proses produksi dan distribusi. Sekaligus mengamini bahwa pasar tidak selalu mampu menghadirkan persaingan yang sempurna.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini, negara direpresentasikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dinas pariwisata dan dinas perhubungan. Dalam pengertian negara strukturalis semi-otonom, pemerintah sebagai representasi dari negara tentu memiliki kepentingan untuk mengembangkan industri pariwisata di Bali, khususnya di Nusa Ceningan. Akan tetapi ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan, yakni keberadaan pihak-pihak lain di luar negara yang juga berkepentingan terhadap industri pariwisata, baik itu pihak swasta maupun masyarakat lokal. Keberadaan multi aktor dan multi kepentingan ini pada akhirnya melahirkan regulasi dan kebijakan tertentu yang menjadi dasar proyeksi pembangunan pariwisata kedepannya.

Selanjutnya, adat dalam penelitian ini direpresentasikan oleh masyarakat lokal Nusa Ceningan. Secara khusus adalah Gerakan perlawanan masyarakat lokal yang tergabung dalam FKNC (Forum Komunikasi Nusa Ceningan), pengurus adat dan

---

<sup>64</sup> Benyamin Molan, 'Sosialisme Ekonomi Karl Marx Dan Karl Polanyi Dalam Perbandingan', *Pusat Pengembangan Etika UNIKA Atma Jaya*, Vol.15, No (2010), hlm. 288.

<sup>65</sup>Siti Aminah, 'Negara, Pasar Dan Masyarakat: Sebuah Studi Sosio-Ekonomi Dan Budaya Pembangunan BRT-Transjakarta' (Universitas Indonesia), hlm. 19-20.

juga Gerakan JED (Jaringan Ekowisata Desa). Eksistensi dari FKNC, pengurus adat dan Gerakan JED menunjukkan fungsi dari adat sebagai basis perjuangan masyarakat. Bukan semata-mata tata aturan kehidupan yang hanya mengurus masalah kehidupan sehari-hari ataupun spiritualitas, yang tidak memiliki dimensi politis-perlawanan terhadap bentuk-bentuk intervensi/dominasi tertentu dari struktur-struktur lain.

Terakhir, pasar dalam penelitian ini direpresentasikan oleh keberadaan dan keterjalinan hubungan antara fasilitas pariwisata seperti destinasi pariwisata, akomodasi dan transportasi, serta modal yang masuk di kawasan Nusa Ceningan. Pada tingkatan yang lebih kompleks, pasar juga direpresentasikan oleh keterjalinan hubungan antar negara, misalnya hubungan antara Indonesia dengan China untuk meningkatkan kunjungan turis ke Indonesia maupun pembangunan fasilitas pariwisata.<sup>66</sup>

Berdasarkan beberapa hal di atas, penelitian ini akan melihat secara kritis bagaimana keterjalinan antara representasi dari negara, adat dan pasar dalam membentuk wajah pariwisata di Nusa Ceningan. Bahwa, masing-masing memiliki kepentingan dalam memperebutkan sumber daya pariwisata di Nusa Ceningan yang menciptakan terjadinya kontestasi antar struktur. Keterjalinan antar representasi dari negara, adat dan pasar serta konsekuensi-konsekuensi yang muncul inilah yang dalam penelitian ini disebut sebagai dinamika perkembangan pariwisata.

---

<sup>66</sup> Francisca Christy Rosana, 'Hubungan Cina - RI Makin Mesra, Luhut: Terutama Untuk Mendukung Pariwisata', *Tempo.Co*, 2019 <<https://bisnis.tempo.co/read/1415882/hubungan-cina-ri-makin-mesra-luhut-terutama-untuk-mendukung-pariwisata/full&view=ok>> [accessed 5 March 2021].

### 3. Relasi antara Negara, Adat dan Pasar dalam Pariwisata Massal

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik. Secara lebih khusus penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik berbasis negara. Yakni pendekatan yang dipusatkan pada ide atau konsep negara memiliki peran aktif dimana negara memiliki agenda-agenda yang tidak dapat direduksi kedalam agenda-agenda pribadi, atau dalam hal ini disebut sebagai negara otonomi relatif.

Dalam konsespi Weberian otonomi negara dimaknai sebagai kemampuan negara untuk merumuskan agenda-agenda yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu tau privat. Dimana pemerintah sebagai representasi dari negara dipahami sebagai pusat agregasi politik atas kepentingan kolektif dan penyedia layanan publik.<sup>67</sup> Di lain pihak, Alfred Stephen mendefinisikan sebagai negara organis statis, yakni negara yang memiliki ciri diantaranya, negara memiliki tujuan utama yakni, moral, tujuan moral merupakan *common good*, yang merupakan prinsip untuk mengontrol setiap kepentingan masyarakat, dan negara memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam urusan politik. Selain itu, Fred Block juga mendefinisikan fungsi dari negara, yakni sebagai katalisator berkembangnya modal (*business confidence*), untuk memupuk kekayaan yang memadai dan sebagai polisi yang mencegah gangguan dalam sistem.<sup>68</sup>

Dalam pandangan Alvi, otonomi semacam ini sebut sebagai otonomi relative, yang hanya ada dalam konsep negara pasca kolonial. Dalam penelitiannya, ia

---

<sup>67</sup> Siti Aminah, 'Negara, Pasar Dan Masyarakat: Sebuah Studi Sosio-Ekonomi Dan Budaya Pembangunan BRT-Transjakarta' (Universitas Indonesia), hlm. 22 dikutip dari William J Baumol, *Welfare Economic and The Theory of State* (Cambridge: Harvard University Press, 1965)..

<sup>68</sup> Aminah, *Ibid*

mengurai beberapa gagasan mendasar mengenai negara pascakolonial. *Pertama*, negara mengalami gejala over developed dalam relasinya dengan masyarakat ditandai dengan membengkaknya apparatus pemerintah dan birokrasi dalam rangka untuk menjaga relasi partronasi dengan masyarakat. *Kedua*, tidak adanya kelas-kelas dominan sebagaimana dalam masyarakat kapitalis barat. *Ketiga*, adanya gejala otoriter birokratis, yang menjadi embrio negara predator atau negara klien untuk mengeruk sumber daya ekonomi untuk kepentingan nasional maupun internasional.<sup>69</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan, dalam konsep negara otonomi relatif, birokrasi menjadi elemen penting bagi negara untuk mempertahankan pola relasinya. Jika ditelusuri, sistem politik birokrasi yang ada di Indonesia dapat dijelaskan menggunakan konsep *bureaucratic polity* Weber. Yakni satu bentuk sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat kebijakan maupun keputusan politik terbatas pada lingkaran penguasa saja. Dimana keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara bukan merupakan representasi dari kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pariwisata, hal ini dapat ditelusuri lewat pola-pola penentuan kebijakan pariwisata, dengan mengkaji secara mendalam mengenai sejauhmana negara melalui birokrasi menguasai ruang-ruang perumusan kebijakan, dan sejauh mana keterlibatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

---

<sup>69</sup> Wasito Raharjo Jati, 'Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga', *Masyarakat Indonesia*, Vol. 39, N (2013), hlm.137.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah *instrumental case study*. Yakni studi kasus yang digunakan bukan karena keinginan untuk memahami hakikat kasus tetapi kasus dalam hal ini digunakan untuk memahami hal lain di luar kasus tersebut.<sup>70</sup> Dalam hal ini peneliti bukan bermaksud untuk memahami tentang pariwisata massal, tetapi lebih pada ingin memahami bagaimana relasi antara adat, negara dan pasar dalam konteks terbentuknya pariwisata massal di Nusa Ceningan. Hal ini menjadikan metode penelitian ini selaras dengan tujuan penelitian.

### **2. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Ceningan, Bali pada pertengahan Maret 2019. Secara administratif pulau ini masuk dalam wilayah Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten, Klungkung, Provinsi Bali. Secara geografis Pulau Ceningan terletak di sebelah Tenggara pulau Bali, dan masuk dalam gugus kepulauan Nusa Penida, bersebelahan (sebelah tenggara) dengan pulau Nusa Lembongan (dipisahkan oleh Selat Ceningan dan dihubungkan dengan jembatan). Untuk mencapai Pulau Ceningan

---

<sup>70</sup> Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). Hlm.

dibutuhkan waktu sekitar 35-40 (menggunakan *speed boat*) menit menyebrangi Selat Badung dan 10-15 menit perjalanan darat melintasi Pulau Nusa Lembangan.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan, Ceningan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Bali yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mempermudah peneliti menelusuri perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di Ceningan. Dimana aktor-aktor yang terlibat masih didominasi oleh aktor dari generasi pertama.

Berikutnya, Bali secara umum memiliki struktur pemerintahan yang 'berbeda' dengan beberapa daerah lain di Indonesia, yakni adanya dualisme pemerintahan di tingkat desa, desa adat dan desa dinas. Perbedaan ini menjadi perhatian sekaligus daya tarik utama dalam pemilihan lokasi penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, adalah sumber data primer sebagai data utama, yakni data-data yang didapat/dihasilkan dari lapangan. Yakni informasi dari narasumber, seperti: pegawai pemerintah, masyarakat lokal, tokoh adat; pelaku usaha/pariwisata, dan hasil observasi: kondisi geografis wilayah, sebaran dan konsentrasi objek/fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan sebagainya.

*Kedua*, yakni sumber data sekunder, sebagai data pendukung. Yakni data-data yang dihasilkan oleh peneliti lain, seperti buku, jurnal,

dokumentasi media massa baik elektronik maupun cetak, laporan-laporan perkembangan pariwisata yang disediakan oleh pemerintah/lembaga lain yang berhubungan dengan pariwisata, laporan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Ada beberapa informasi dasar yang digali dalam proses wawancara tersebut, yakni perkembangan pariwisata, respon masyarakat lokal terhadap pariwisata, perkembangan dan perubahan mata pencaharian, kebijakan-kebijakan tentang pariwisata, posisi dan peran pemerintah desa/adat dalam pariwisata, model pengelolaan pariwisata, relasi antar struktur dalam pengelolaan pariwisata, aturan/kebijakan lokal tentang pariwisata, dan lain sebagainya.

Pemilihan informan didasarkan pada beberapa pertimbangan, *pertama* keterwakilan dari beberapa unsur masyarakat yakni: pegawai/pejabat pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, tokoh adat/pengurus adat, masyarakat Lokal, pelaku pariwisata lokal, dan penggerak/Lembaga Swadaya Masyarakat terkait. *Kedua*, kompetensi informan dalam memberikan data dan informasi. Pertimbangan kedua ini tidak selalu harus linier dengan pertimbangan pertama, misalnya Ketika peneliti menemui pedagang di pantai *Devil Tears*. Akan tetapi pertimbangan

pertama harus linier dengan pertimbangan kedua. Adapun penentuan individu/orangnya ditentukan menggunakan tiga metode. *Pertama* secara *purposive* dengan meminta nama-nama dan kontak dari Yayasan Wisnu dan tokoh adat (Mangku Mirah). *Kedua*, secara *snowball sampling* berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber. *Ketiga*, secara acak, metode ini diterapkan ketika melakukan observasi dengan mendatangi masyarakat setempat.

Pemilihan informan berdasarkan unsur di atas bertujuan agar informasi yang didapat komprehensif dan tidak bias struktur. Sedang penggunaan metode penentuan individu/orang yang berbeda-beda bertujuan untuk menghindari bias informasi yang di dapat oleh peneliti. Namun, peneliti tidak berhasil menemui pelaku usaha dari luar (investor luar) dikarenakan keterbatasan waktu dan akses, baik akses informasi maupun akses lokasi, karena beberapa informan tersebar di pulau yang berbeda.

**Tabel .1 Rekapitulasi Informan Wawancara**

No	Informan	Tanggal Wawancara	Keterangan
1	Suardana	11 Maret 2019	Yayasan
2	Atik	11 Maret 2019	Wisnu (LSM)
3	Mangku Mirah	11,14,17 Maret 2019	Tokoh adat/Aktivis JED (Jaringan Ekowisata Desa)
4	Diah	12 Maret 2019	Warga Lokal
5	I Made Sukadana	13 Maret 2019	Bendesa/Kepala Desa Adat Lembongan
6	I Gede Sukajaya	13 Maret 2019	Perbekel/Kepala Desa Dinas Lembongan

7	Pelaku Wisata	13 Maret 2019	Pedagang di Pantai Devil Tears dan Pemilik <i>Mimpi Cottage</i>
8	I Made Sukabawa	14 Maret 2019	Masyarakat Lokal/Pelaku Wisata/Pebisnis Tanah
9	Mangku Bajil	14 Maret 2019	Tokoh Adat/Pemilik Resort The Davis
10	Mangku Buda	14 Maret 2019	Tokoh Adat
11	Warga	15 Maret 2019	Masyarakat Lokal/Mantan Petani Rumput Laut
12	Bagas	16 Maret 2019	Pelaku Wisata/Mantan anggota Forum Komunikasi Nusa Ceningan
13	Darji	16 Maret 2019	Pemulung asal Jawa
14	Embon	16 Maret 2019	Warga Lokal/Mantan anggota FKNC dan LSM LP3 NKRI
15	Ketut Juwita	17 Maret 2019	Anggota Koperasi Walet/Mantan Anggota FKNC
16	Dekor	17 Maret 2019	Warga Lokal/Mantan anggota FKNC
17	I Ketut Gunaksa	18 Maret 2019	Bendesa/Kepala Desa Jungut Batu
18	Kunn	18 Maret 2019	Petani Rumput Laut
19	Setya Adnyana	19 Maret 2019	Sekretaris Camat Kecamatan Nusa Penida
20	Sudar	20 Maret 2020	Ketua Pemuda/Pelaku Wisata
21	Komang	21 Maret 2019	Aktivis JED (Jaringan Ekowisata Desa)
22	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	22 Maret 2019	Pemerintah Kabupaten

Sumber: Olahan data Peneliti

## b. Observasi

Teknik pengambilan data melalui observasi diterapkan dengan cara *live-in*. Peneliti tinggal bersama dengan salah satu tokoh adat Bali yang disebut sebagai *mangku*<sup>71</sup>. Peneliti tinggal di lokasi penelitian selama kurang lebih dua minggu, yakni pada pertengahan bulan Maret 2019. Selama tinggal di lokasi penelitian, peneliti mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik itu kegiatan sosial, ekonomi, maupun yang berkaitan dengan ritus peribadatan.

Selain itu, peneliti juga melakukan orientasi ruang/pengamatan secara singkat kondisi geografis/fisik pulau dengan cara berkeliling pulau. Orientasi ruang ini bertujuan untuk memetakan secara singkat lanskap pulau Ceningan secara fisik, seperti letak dan kondisi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat wisata, akses jalan, fasilitas umum, konsentrasi rumah penduduk dan sebagainya. Proses ini dilakukan di hari pertama penelitian. Karena ukuran pulau yang kecil sekitar 300 Ha, proses ini tidak memakan waktu lama.

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam ke beberapa lokasi. Diantaranya adalah sepanjang garis pantai Pulau Ceningan, daerah sekitar *Bridge Yellow* (Jembatan penghubung antara Pulau Ceningan dan Pulau Lembongan), tempat wisata yang berada di ujung timur Ceningan, lokasi bekas pemberdayaan rumput laut yang

---

<sup>71</sup> *Mangku* merupakan sebutan yang disematkan kepada tokoh agama yang telah melalui suatu proses penyucian tertentu. *Mangku* dipercaya oleh masyarakat Bali sebagai perantara antara manusia dan Sang Pencipta.

terletak di selat yang membelah antara Pulau Ceningan dan Lembongan, dan beberapa fasilitas wisata yang terdapat di Pulau Tersebut, seperti *bungalow/resort* dan restoran.

Selain melakukan observasi di Pulau Ceningan, peneliti juga melakukan observasi di beberapa tempat di Pulau Lembongan, diantaranya adalah beberapa pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan, seperti *Mushroom Bay*, *Devil Tear's* dan *Jungut Batu Beach*, tempat pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir. Observasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan kondisi pariwisata di Ceningan.

### **c. Dokumentasi**

Terakhir teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Yakni data-data yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, baik dari pemerintah, masyarakat desa dan lainnya, baik yang tersimpan sebagai arsip, maupun telah terpublikasi di media cetak dan elektronik. Data-data ini merupakan data sekunder.

Peneliti berhasil mendapatkan beberapa data sekunder penting, diantaranya, data demografi penduduk, data data okupansi hotel/resort dan kunjungan di Nusa Lembongan yang di dapat dari pemerintah desa, beberapa publikasi mengenai pariwisata dari pemerintah kabupaten dan kecamatan, publikasi dari Yayasan Wisnu tentang pariwisata dan Jaringan Ekowisata Desa, serta beberapa dokumentasi pemetaan

partisipatif Ceningan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Nusa Ceningan (FKNC) bekerja sama dengan Yayasan Wisnu.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, alur analisis data yang digunakan mengikuti alur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Yakni:

### 1. *Data Condensation/Reduksi Data.*

Pada proses reduksi data ini, data yang telah terkumpul kemudian mengalami proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi melalui proses koding (Miles, Huberman, Saldana 2014). Merujuk pada proses koding yang dikemukakan oleh Saldana terdapat dua tahapan koding dalam proses kondensasi data ini, yakni *first cycle coding* dan *second cycle coding*.<sup>72</sup>

#### *First Cycle Coding*

Pada tahapan ini, pertama-tama peneliti melakukan pemilahan data yang didapat dari lapangan, seperti hasil wawancara, catatan harian dan catatan observasi, untuk memastikan data-data yang diolah sesuai dengan kerangka konseptual dan tujuan dari penelitian ini. Output dari proses ini adalah keserasian antara data yang didapat dengan kerangka konseptual yang sudah dibuat.

---

<sup>72</sup> Johnny Saldana, *The Coding Manual For Qualitative Researchers* (London: SAGE Publications Ltd, 2009).

Setelah proses pemilahan ini, data masuk dalam proses koding. Pertama-tama data akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi aktor/struktur; negara, adat dan pasar.

Selanjutnya adalah melakukan beberapa koding:

- a) **Attribute coding**, sebagai bentuk manajemen data. Yakni pemberian sistem tanda pada masing masing data, agar data mudah untuk dikenali.
- b) **Structural coding**, dilakukan dengan melabelkan *conceptual phrass*/frasa konseptual pada data-data lapangan. Frasa konseptual ini mewakili topik pertanyaan yang dibangun peneliti ketika observasi ataupun ketika waawancara.
- c) **Descriptive coding**, proses ini dilakukan dengan menyederhanakan/mengabstraksikan kalimat-kalimat panjang dari data lapangan kedalam struktur kalimat yang lebih pendek, dengan tetap mengacu pada topik/intisari data.
- d) **In-Vivo coding**, pengkodean data ini dilakukan dengan memilah informasi dari narasumber wawancara yang memiliki bobot lebih untuk dicantumkan dalam bentuk kutipan langsung dalam penyajian data. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap suara/informasi yang disampaikan oleh informan. Proses koding ini juga bisa memperkuat penyajian data dan analisis yang dilakukan.

### **Second Cycle Coding**

Setelah tahap *first cycle coding*, tahap berikutnya dalam kondensasi data adalah *second cycle coding*. Pada tahapan ini, hasil tahap koding pada *first cycle coding* akan dikoding kembali melalui proses *focused coding*. Fokus koding ini berfungsi untuk melihat sejauh mana kategori-kategori sering muncul dan signifikan untuk dikembangkan dan paling memungkinkan untuk dianalisis.

## **2. Data Display/Penyajian Data**

Pada tahap ini data yang sudah melalui proses koding ditampilkan dalam bentuk *display data*. Dalam tahap ini, hasil koding berupa informasi mengenai struktur-struktur yang terlibat dalam perkembangan pariwisata di Ceningan beserta peran serta fungsinya, ataupun data-data mengenai perkembangan pariwisata Ceningan, akan ditampilkan dalam bentuk narasi, tabel, gambar, matrik, bagan dan diagram.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data.**

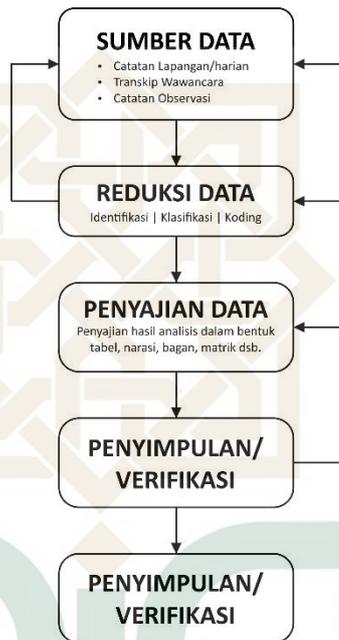
Pada tahapan ini data yang tersaji sebelumnya kemudian diinterpretasikan, untuk menemukan makna, keterangan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi.<sup>73</sup> Interpretasi didasarkan pada kerangka teoritis yang telah dibangun sebelumnya. Tahap ini, sekaligus menjadi sarana untuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni mengenai bagaimana relasi antara adat, negara dan pasar dalam dinamika

---

<sup>73</sup> Salim 2006. hlm. 20.

pariwisata di Ceningan, dan bagaimana relasi tersebut menciptakan struktur kesempatan bagi perkembangan pariwisata masal di Ceningan.

**Bagan 1: Alur Proses Analisis Data**



Sumber: Disarikan dari metode analisis Miles dan Huberman

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini, disajikan dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki preferensi pembahasan yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Berikut adalah pembagian bab dan preferensi pembahasannya:

**BAB I** : Bab ini berisi beberapa bagian, yakni, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam keseluruhan struktur penulisan hasil penelitian ini, bab ini memiliki posisi penting untuk menjelaskan apa, mengapa dan

bagaimana penelitian tentang dinamika pariwisata masal di Ceningan ini dilakukan.

**BAB II** : Bab ini berisi mengenai profil dan perkembangan pariwisata di Ceningan. Meliputi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi geografis, dan secara khusus kondisi pariwisata di Ceningan.

**BAB III** : Bab ini menjelaskan mengenai perkembangan pariwisata di Ceningan beserta struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik yang terlibat di dalamnya. Dengan menitikberatkan pada posisi, peran serta fungsinya masing-masing.

**BAB IV** : Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana relasi antar struktur dalam dinamika pariwisata masal di Ceningan. Sekaligus menjelaskan bagaimana relasi antar struktur tersebut membuka peluang berkembangnya pariwisata masal di Ceningan.

**BAB V** : Bab ini berisi beberapa bagian, yakni kesimpulan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara negara, adat dan pasar dalam perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan, berperan besar dalam menentukan arah pembangunan pariwisata di Kawasan tersebut. Relasi ketiganya dari waktu ke waktu dapat direkonstruksi kedalam tiga bentuk relasi, yakni, *pertama* konfrontatif, terjadi pada akhir tahun 1990-awal tahun 2000. *Kedua* kontestatif, terjadi pada awal sampai pertengahan tahun 2000an. *Ketiga* eksploitatif, terjadi pada akhir tahun 2000an sampai saat ini. Ketiga bentuk relasi ini menunjukkan trend yang hampir sama dari waktu ke waktu yakni menguatnya negara dan pasar serta melemahnya adat. *Trend* ini menunjukkan relasi *overdeveloped* negara terhadap masyarakatnya.

Trend relasi tersebut telah membuka struktur kesempatan berkembangnya pariwisata massal di Nusa Ceningan. Perkembangan pariwisata massal di Nusa Ceningan ini bisa ditelusuri melalui tiga hal, *pertama*, adanya pengorganisasian terhadap wisatawan oleh agen untuk mengoptimalisasikan profit. *Kedua*, penyeragaman terhadap destinasi pariwisata di Nusa Ceningan yang kebanyakan berbasis pada *sun, sand and sea*. *Ketiga*, penyeragaman destinasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya inkonsistensi branding pariwisata budaya dalam narasi-narasi yang dibentuk oleh negara. Ketiga hal ini terus dipertahankan dengan

tetap menjaga pola relasi patron-klien dan subordinatif terhadap adat. Dengan demikian, negara dan pasar akan terus mendominasi sumber daya pariwisata di Nusa Ceningan, sekaligus sebagai pemeran utama yang memegang arah perkembangan pariwisata di pulau tersebut.

Berdasarkan hal ini pada dasarnya pariwisata massal yang berkembang di Nusa Ceningan bukan merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan. Akan tetapi pariwisata massal merupakan proyeksi pembangunan pariwisata yang sengaja di desain oleh negara dan pasar. Atau dalam Bahasa lain, pariwisata massal merupakan bentuk pembangunan pariwisata yang memang diharapkan oleh negara dan pasar. Di mana melalui pariwisata massal, negara dan pasar memiliki kontrol penuh terhadap faktor produksi.

## **B. Sumbangan Penelitian**

Sebagaimana telah disampaikan pada bab I secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan dalam kajian ekonomi-politik dalam pariwisata. Penelitian ini memberikan sumbangan berupa penjelasan mengenai peranan negara, adat dan pasar, yang menunjukkan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini juga sudah menjelaskan mengenai dinamika perkembangan pariwisata masalah di Nusa Ceningan melalui penjelasan bagaimana sejarah pariwisata di Nusa Ceningan dari awal perkembangannya hingga saat ini, beserta konteks sosial yang melingkupinya serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari masuknya industri pariwisata.

Berdasarkan dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini telah memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema serupa. Yakni, penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hakikat pariwisata itu sendiri, dan bagaimana pariwisata massal ini secara dialektis direspon oleh negara, adat dan pasar.

Secara praktis penelitian ini memberikan sumbangan dan manfaat bagi pemerintah, pengurus desa adat/masyarakat lokal, pelaku wisata dan organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak dalam pariwisata. Bagi pemerintah utamanya penelitian ini menjadi kritik atas kebijakan dan pola pembangunan pariwisata di Nusa Ceningan. Bagi pengurus adat dan masyarakat lokal, penelitian ini bermanfaat dalam hal memberikan gambaran bagaimana posisi adat dalam pusaran industri pariwisata atau setidaknya menjadi. Bagi pelaku wisata lokal, penelitian ini memberi manfaat mengenai bagaimana sistem ekonomi pariwisata di Nusa Ceningan berjalan, dan bagaimana perputaran sumber daya terjadi. Terakhir bagi organisasi nirlaba/masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat.

### **C. Keterbatasan Penelitian, Rekomendasi**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal keluasan cakupan penelitian dan kedalaman informasi, yang dalam banyak hal menyulitkan peneliti dalam merekonstruksi hasil penelitian ini. Sekalipun dalam hal

ini peneliti berhasil menemukan konfigurasi bangunan dinamika pariwisata massal di Nusa Ceningan. Dalam hal kedalaman informasi, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses ke informan-informan strategis, khususnya informan yang berada di luar Nusa Ceningan atau luar Bali. Akan tetapi hal ini bisa diatasi dengan mencari sumber-sumber lain yang dapat menggantikan posisi informan tersebut dan bisa memberikan informasi yang signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik dengan cakupan informan yang luas dan mandalam. Hal ini dapat ditunjang salah satunya dengan menggunakan metode penelitian yang relevan.

Secara teoritis, teori ekonomi-politik yang digunakan dalam penelitian ini relevan untuk melihat bagaimana dinamika relasi antara negara, adat dan pasar dalam konteks perkembangan pariwisata massal di Nusa Ceningan. Hal ini dikarenakan, pendekatan ekonomi-politik menekankan pada aspek kritis yang mendasari relasi ketiganya. Di mana, hubungan ketiganya ditempatkan sebagai sebuah kontestasi perebutan sumber daya pariwisata, bukan semata-mata sebagai sebuah relasi antar aktor yang bersifat struktural yang saling menguntungkan. Adapun secara metodologis, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara umum dapat mendukung, khususnya dalam metode pengambilan data dan analisis data.

Adapun bagi dunia pariwisata peneliti saran, yakni, untuk mengubah pola relasi dalam dunia pariwisata, perlu adanya satu bentuk perubahan

yang signifikan yang sistematis, baik dari segi tatanan birokrasi pariwisata maupun produk-produk kebijakan yang dihasilkannya. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan industri pariwisata yang transparan dan partisipatif, utamanya dalam rangka membuka ruang-ruang keterlibatan adat dan masyarakat lokal yang lebih strategis. Sehingga arah pergerakan pariwisata kedepan tidak kontradiktif dan destruktif terhadap tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya di Nusa Ceningan.

Selain adanya perubahan struktural yang sistematis, masyarakat juga perlu kembali mengorganisir diri dalam satu bentuk organisasi sebagai wadah untuk memupuk kesadaran kritis terhadap tatanan ekonomi-politik pariwisata. Sekaligus menjadi wadah untuk melakukan kerja-kerja politik, semacam melakukan advokasi dan pendidikan kritis terhadap masyarakat adat di Nusa Ceningan. Selanjutnya, adat juga perlu melakukan pembenahan pembaharuan terhadap hukum adat yang berlaku. Dengan menambahkan nomenklatur-nomenklatur yang rigid tentang pariwisata, misalnya adalah mengenai tata ruang dan wilayah pulau Nusa Ceningan. Sebagai acuan bagi adat dalam rangka mengontrol perkembangan pariwisata di Nusa Ceningan.

Terakhir, adat sebagai entitas sosial-politik paling dekat dengan masyarakat, perlu menjadi motor penggerak perubahan sosial di Nusa Ceningan. Utamanya dalam rangka mengembalikan kesadaran masyarakat terhadap jati diri masyarakat Nusa Ceningan sebagai masyarakat pertanian. Fungsi adat ini penting dalam rangka membangun

sistem ekonomi lokal, yang dapat bermanfaat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Nusa Ceningan, khususnya sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- , *Theories of Political Economy*, 13th edn (New York: Cambridge University Press (CUP), 2005)
- Atmaja, Ida Bagus Kade Yoga, *Ekowisata Rakyat: Lika-Liku Ekowisata Di Tenganan, Pelaga, Sibtan, Dan Nusa Ceningan, Bali* (Bali: Wisnu Press, 2002)
- Carporaso, James A., and David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Davidson, Jamie S., David Henley, and Sandra Moniaga, eds., *Adat Dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Kurnianingsih, Ambarwati, *Ekowisata Kerakyatan: Memiliki Kembali Bali* (Badung: Matamera Book dan Wisnu Press, 2008)
- Mudhofir, Abdil Mughis, 'Negara, Kapital Dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson Dan Vedi R. Hadiz', in *Oligarki: Teori Dan Kritik*, ed. by Abdil Mughis Mudhofir and Coen Husein Pontoh (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020), pp. 28–63
- Picard, Michel, *Bali, Cultural Tourism and Touristic Culture* (Singapore: Archipelago Press, 1996)
- Prayoga, Aldwin Flobert, 'Politik Pariwisata: Relasi Pemerintah Daerah Dan Balai Besar TNBTS Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Bromo' (Universitas Airlangga, 2019)
- Qodriyatun, Sri Nurhayati, *Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi* (Indonesia, 2018)
- Saldana, Johnny, *The Coding Manual For Qualitative Researchers* (London: SAGE Publications Ltd, 2009)
- Salim, Agus, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
- Vickers, A, *Bali: A Paradise Created* (Hong Kong: Periplus, 1989)
- W., I GUSTI NGURAH Parikesit, *Liberalisasi Jasa Dan Masa Depan Pariwisata*

*Kita* (Denpasar: Universitas Udayana Press, 2014)

Warren, Carol, *Adat and Dinas Balinese Communities in the Indonesian State* (New York: Oxford University Press (OUP), 1993)

**Jurnal:**

Adiprana, I Putu Gatot, and IGA Oka Mahagangga, 'Dinamika Perkembangan Pariwisata Di Desa Pakraman Ubud', *Jurnal Destinasi Pariwisata Universitas Udayana*, Vol. 1, No (2013)

Agus, Rustam, 'Retribusi Pariwisata Dongkrak PAD Klungkung', *Bisnis.Com*, 2019

<[http://www.pidii.info/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2062&catid=39](http://www.pidii.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2062&catid=39)> [accessed 1 August 2020]

Aminah, Siti, 'Negara, Pasar Dan Masyarakat: Sebuah Studi Sosio-Ekonomi Dan Budaya Pembangunan BRT-Transjakarta' (Universitas Indonesia)

Andalagi, Christian Erens Ponglabba, 'Tourism Diplomacy Between Indonesia and People's Republic of China (PRC): The Implementation of Marine in North Sulawesi as a Case Study' (President University, 2018)

Andika Widiastara, Nyoman, and I Made Adikampana, 'Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pura Goa Giri Putri Nusa Penida', *Jurnal Destinasi Wisata*, Vol. 5 No. (2017)

Artini, Ni Wayan Putu, and Iga Lies Anggreni, 'Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)', *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana*, Vol. 1, No (2007)

Hiariej, Eric, 'Teori Negara Marxis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, Vol.7, No. (2003)

Jati, Wasito Raharjo, 'Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga', *Masyarakat Indonesia*, Vol. 39, N (2013)

Ka Leong, Chong, 'The "Noble" Impacts of Mass Tourism on Bali Island: A Local

- Prospective', *Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts*, Vol. 11 (2019)
- , 'The Side Effects of Mass Tourism: The Voices of Bali Islanders', *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, Vol. 25 (2020)
- Kartika, Ni Gusti Ayu, 'Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat Dan Pariwisata', *Jurnal Ilmiah Pariwisata, Agama Dan Budaya Fakultas Dharma Duta*, Vol. 4, No (2019)
- Konsukartha, IGM., T. Gunawan, and I.B. Mantra, 'The Indigenous Society Perception Towards the Regional Spatial Planning Implementation in Nusa Ceningan, Klungkung, Bali', *Manu.Ria Dan Lingkungan*, Vol. X No. (2003)
- Landra, Putu Tuni Cakabawa, 'Hukum Investasi Dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali', *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol.7, No. (2018)
- Lee, Jung Wan, and Ahmad Mujafar Syah, 'Economic and Environmental Impacts of Mass Tourism on Regional Tourism Destinations in Indonesia', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 5 No. 3 (2018)
- Makahinda, Nowzellita, Daicy Lengkong, and Deysi Tampongangoy, 'PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BITUNG', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3 (2015)
- Molan, Benyamin, 'Sosialisme Ekonomi Karl Marx Dan Karl Polanyi Dalam Perbandingan', *Pusat Pengembangan Etika UNIKA Atma Jaya*, Vol.15, No (2010)
- Noak, Piers Andreas, and I Ketut Putra Erawan, 'Multikulturalisme Desa Di Bali Dalam Kontrol Negara: Implementasi Dana Desa Bagi Kegiatan Lintas Budaya Di Badung Dan Buleleng', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, Vol. 1, No (2019)
- Ringa, Maria Bernadetha, Nyoman Djinar Setiawina, Made Heny Urmila Dewi, and A.A.I.N. Marhaeni, 'Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Bapeda NTT*, Vol. 5 (2017)
- Sastrawan, I.P.D., I.G.N. Guntur, and D.W.I. Andari, 'Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali', *Jurnal Tunas Agraria*, 2018

- Sayeda, Takrima, 'The Effects of Mass Tourism: An Evaluative Study on Cox's Bazar, Bangladesh', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22, No.1.5 (2017)
- Sudantra, I Ketut, 'Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No (2018)
- Suwirta, I Made, 'Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali', *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, Vol.4, No. (2020)
- Syamsudin, M., 'Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara', *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.15, No (2008)
- Vickers, Adrian, 'Bali Membangun Kembali Industri Pariwisata: 1950-An', *Jurnal Kajian Bali*, 2013
- Webster, Craig, Stanislav Ivanov, and Steve Illum, 'Political Economy and Tourism Policy: NTOs and State Polic', *SSRN Electronic Journal*, 2009 <<http://ssrn.com/abstract=1372037>>
- Wirasenjaya, Ade Marup, 'Disharmoni Negara Dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal', *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.2, No. (2013)

**Website:**

- Agus, Rustam, 'Retribusi Pariwisata Dongkrak PAD Klungkung', *Bisnis.Com*, 2019 <[http://www.pidii.info/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2062&catid=39](http://www.pidii.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2062&catid=39)> [accessed 1 August 2020]
- Andalagi, Christian Erens Ponglabba, 'Tourism Diplomacy Between Indonesia and People's Republic of China (PRC): The Implementation of Marine in North Sulawesi as a Case Study' (President University, 2018)
- Apriliani, Dea, 'Kemajuan Pariwisata Indonesia, Penyumbang Devisa Terbesar Indonesia', *Good News from Indonesia*, 2018 <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/23/kemajuan-pariwisata-indonesia-penyumbang-devisa-terbesar-indonesia>>

- Christiyaningsih, 'Pembab Klungkung Terapkan Retribusi Wisatawan Mulai Juni', *Republika Online*, 2019 <<https://republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/19/06/04/pskrd7459-pembab-klungkung-terapkan-retribusi-wisatawan-mulai-juni>> [accessed 6 March 2021]
- ed. Asdhiana, Made, '80 Persen Investasi Pariwisata Bali Dikuasai Asin', *Kompas*, 2012  
<<https://travel.kompas.com/read/2012/11/25/08404619/80.persen.investasi.pariwisata.bali.dikuasai.asing>> [accessed 25 July 2020]
- Galikano, Silvia, 'Sampah Masih Jadi Pekerjaan Besar Untuk Pariwisata', *CNN Indonesia*, 2016 <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160521180342-269-132441/sampah-masih-jadi-pekerjaan-besar-untuk-pariwisata>>
- Gumelar, Galih, 'Rumput Laut Dikenakan Bea Keluar, Harga Langsung Anjlok', *CNN Indonesia*, 2015  
<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150216185449-92-32571/rumput-laut-dikenakan-bea-keluar-harga-langsung-anjlok>> [accessed 31 July 2019]
- Hiariej, Eric, 'Teori Negara Marxis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, Vol.7, No. (2003)
- 'History of JED' <<https://jed.or.id/history-of-jed/>> [accessed 6 February 2021]
- Jaramaya, Rizky, 'Petani Keluhkan Serapan Rumput Laut Di Dalam Negeri Rendah', *Republika Online*, 2016  
<<https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/02/17/o2or2b383-petani-keluhkan-serapan-rumput-laut-di-dalam-negeri-rendah>> [accessed 31 July 2020]
- Koresponden, Non, 'Ini Reaksi Investor Saat Klungkung Janji Mudahkan Investasi', *Koran Tempo*, 2019 <<https://travel.tempo.co/read/1282166/ini-reaksi-investor-saat-klungkung-janji-mudahkan-investasi/full&view=ok>> [accessed 1 August 2019]
- Kurnia, Erika, 'Kisah "Cendol" Dan Sampah Pariwisata Indonesia', *Kompas*, 2019 <<https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/09/11/kisah-cendol-dan-sampah-pariwisata-indonesia-untuk-mas-hen/>>
- Maga, Anwar, 'Warga NTB Suarakan Konflik Lahan Di Kawasan Mandalika Resort', *Antara NTB*, 2014  
<<https://mataram.antaranews.com/berita/25805/warga-ntb-suarakan-konflik->

- lahan-di-kawasan-mandalika-resort> [accessed 5 March 2021]
- Manurung, Martin, 'Investasi Asing, Antara Mitos Dan Realita', *Indo Progress*, 2007 <<https://indoprogress.com/2007/04/investasi-asing-antara-mitos-dan-realita/>> [accessed 25 July 2020]
- Mardiastuti, Aditya, 'Bupati Klungkung Ungkap Penghambat Investasi Di Nusa Penida', *Detik Finance*, 2019 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4793370/bupati-klungkung-ungkap-penghambat-investasi-di-nusa-penida>> [accessed 1 August 2020]
- Molan, Benyamin, 'Sosialisme Ekonomi Karl Marx Dan Karl Polanyi Dalam Perbandingan', *Pusat Pengembangan Etika UNIKA Atma Jaya*, Vol.15, No (2010)
- Mustofa, Ali, 'Tarik Investasi, Klungkung Usulkan Tarif Pajak Hiburan Turun 50 Persen', *Radar Bali*, 2019 <<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/10/15/160899/tarik-investasi-klungkung-usulkan-tarif-pajak-hiburan-turun-50-persen>> [accessed 1 August 2020]
- 'Pariwisata Budaya Perkuat Citra Dan Branding Pulau Bali', *Kabarnusa.Com*, 2016 <<https://www.kabarnusa.com/2016/10/pariwisata-budaya-perkuat-citra-dan.html>> [accessed 5 March 2021]
- Prayoga, Aldwin Flobert, 'Politik Pariwisata: Relasi Pemerintah Daerah Dan Balai Besar TNBTS Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Bromo' (Universitas Airlangga, 2019)
- PUBinfo, Redaksi, 'BTDC - PT Bali Tourism Development Corp (Persero)' <<https://www.pubinfo.id/instansi-476-btbc--pt-bali-tourism-development-corp-persero.html>> [accessed 6 February 2021]
- Purningsih, Dewi, 'Masalah Sampah (Masih) Jadi Hambatan Pariwisata', *Greeners.Co*, 2019 <<https://www.greeners.co/berita/masalah-sampah-masih-jadi-hambatan-pariwisata/>>
- Putra, Aditya Pradana, 'Duh, 80 Persen Investasi Pariwisata Bali dikuasai Asing', *Republika Online*, 2012 <<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/11/24/mdzsbu-duh-80-persen-investasi-pariwisata-bali-dikuasai-asing>> [accessed 25 July 2020]
- Rosana, Francisca Christy, 'Hubungan Cina - RI Makin Mesra, Luhut: Terutama Untuk Mendukung Pariwisata', *Tempo.Co*, 2019

- <<https://bisnis.tempo.co/read/1415882/hubungan-cina-ri-makin-mesra-luhut-terutama-untuk-mendukung-pariwisata/full&view=ok>> [accessed 5 March 2021]
- Rosidin, Imam, 'Pelabuhan Segitiga Emas Di Bali Mulai Dibangun', *Kompas.Com*, 2020  
<<https://regional.kompas.com/read/2020/08/03/13273891/pelabuhan-segitiga-emas-di-bali-mulai-dibangun?page=all>> [accessed 6 March 2021]
- Sangaji, Anto, 'Manifesto Komunis Dan Teori Negara', *Indo Progress*, 2011  
<<https://indoprogress.com/2011/07/manifesto-komunis-dan-teori-negara/>> [accessed 23 July 2020]
- Sosiawan, 'Investasi Di Nusa Peida Diarahkan Ke Timur', *Balipost*, 2018  
<<https://www.balipost.com/news/2018/01/31/36122/Investasi-di-Nusa-Penida-Diarahkan...html>> [accessed 1 August 2020]
- Subagyo, 'Menpar Siap Raih Target 20 Juta Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui ATF', *Antara News*, 2019  
<<https://www.antaraneews.com/berita/788826/menpar-siap-raih-target-20-juta-kunjungan-wisatawan-mancanegara-melalui-atf>>
- Suputra, Eka Mita, '50 Persen Akomodasi Wisata Di Lembongan Belum Berizin, 192 Pemilik Usaha Ikuti Sosialisasi IMB', *Tribun-Bali.Com*, 2020  
<<https://bali.tribunnews.com/2020/06/28/50-persen-akomodasi-wisata-di-lembongan-belum-berizin-192-pemilik-usaha-ikuti-sosialisasi-imb.%0A>> [accessed 1 August 2020]
- Suriyani, Luh De, 'Kisah Hilangnya Rumput Laut Nusa Lembongan', *Mongabay Indonesia*, 2018 <<https://www.mongabay.co.id/2018/09/30/kisah-hilangnya-rumput-laut-nusa-lembongan/>> [accessed 31 July 2019]
- Suryajaya, Martin, 'Dialectical Materialism Strikes Back', *Indoprogress*, 2012  
<<https://indoprogress.com/2012/08/dialectical-materialism-strikes-back/>> [accessed 23 July 2020]
- Wan, and Nat, 'Proyek Pelabuhan Segitiga Emas Dimulai', *Nusabali.Com*, 2020  
<<https://www.nusabali.com/berita/78516/proyek-pelabuhan-segitiga-emas-dimulai>> [accessed 3 August 2020]

**Laporan:**

*Kecamatan Nusa Penida Dalam Angka 2015* (Klungkung, 2016)

*Profil Desa Lembongan, 2017*

World Tourism Organization (UNWTO), *UNWTO Tourism Highlights*, 2018th edn  
(Madrid, 2018)

Organization, United Nations Environment Programme and World Tourism,  
*Tourism in the Green Economy- Background Report* (Madrid)

*Dokumen Pemetaan Partisipatif Spasial dan Kawasan Nusa Ceningan*

**Peraturan Daerah dan Undang-undang:**

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  
Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak  
Restoran

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten  
Klungkung tahun 2013-2033

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat

Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang No.1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA